

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN**  
**PENAHANAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 14 TAHUN**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG**  
**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**  
**HAZIMAH SUHERWAN**  
**2110111116**

**PROGRAM KEKHSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.  
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

**No.Reg : 22/PK-IV/III/2025**

No. Alumni Universitas	Hazimah Suherwan	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 05 September 2003 b. Nama Orangtua : Suherwan & Dayeni c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110111116	f. Tanggal Lulus : 18 Juni 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3,96 j. Alamat : Komp. Villa Sentosa II Blok C No. 2, Padang, Sumatera Barat.	

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 14 TAHUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)**

(Hazimah Suherwan, 2110111116, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92 Halaman, 2025)

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menelaah proses hukum pada kasus dengan Nomor Perkara : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pada kasus ini terdapat seorang anak berusia 13 tahun 4 bulan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diancam pidana pada Pasal 368 ayat (2) ke2 KUHP Jo. UU SPPA. Dalam proses penegakan hukum, anak pelaku melarikan diri ke luar kota dengan memperoleh bantuan dari keluarga, agar terhindar dari proses pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini mengakibatkan persidangan tertunda sebanyak 2 kali persidangan. Peristiwa ini terjadi dikarenakan tidak dapat dilakukannya penahanan pada anak pelaku yang masih berusia di bawah 14 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.? 2. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang (Kejari) dalam penanganan perkara pada penahanan anak di bawah umur 14 tahun? Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang. Adapun data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan proses hukum pada anak di bawah umur 14 tahun tidak sesuai dengan pengaturan penahanan pada UU SPPA. Dikarenakan sikap tidak kooperatif anak pelaku telah menghambat proses penegakan hukum, sehingga dibutuhkan tindakan untuk melakukan pengamanan terhadap anak pelaku karena tidak dapat dilakukan penahanan terhadapnya. 2. Kendala dan upaya dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Kejari yaitu: a. Kekosongan hukum; b. Tidak terdapat anggaran untuk melakukan pencarian; c. Orang tua anak pelaku menghalangi proses penegakan hukum; d. Kurangnya kesadaran hukum; e. Kurangnya partisipasi Bapas; f. Tidak adanya rasa bersalah dan tanggung jawab dari dalam diri anak pelaku. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: a. Melakukan penempatan anak pelaku di Mushola Polsek Padang Utara; b. Melakukan pencarian terhadap anak pelaku menggunakan dana pribadi; c. Memberikan peringatan pada orang tua anak pelaku; d. Memberikan tindakan pemberdayaan kepada anak pelaku; e. Peradilan Cepat; f. Menempatkan kembali anak pelaku di LPKS.

**Kata Kunci:** Penahanan, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

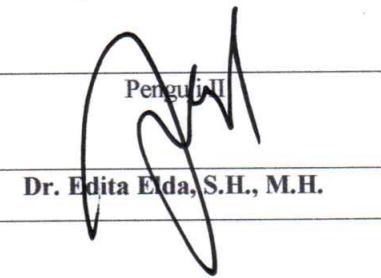
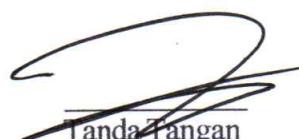
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 18 Juni 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Riki Afrizal, S.H., M.H.	Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

No. University Alumni	Hazimah Suherwan	No. Faculty Alumni
<p>a. Place/Date of Birth : Padang/ September 5<sup>th</sup> 2003</p> <p>b. Parents' Name : Suherwan &amp; Dayeni</p> <p>c. Faculty : Law</p> <p>d. Concentration : Criminal Law</p> <p>e. No. BP : 2110111116</p>	<p>f. Graduation Date : June 18<sup>th</sup> 2025</p> <p>g. Predicate : With Honours</p> <p>h. Length of Study : 3 Years 10 Month</p> <p>i. GPA : 3,96</p> <p>j. Address : Komp. Villa Sentosa II Blok C No. 2, Padang, Sumatera Barat.</p>	

**IMPLEMENTATION DETENTION OF CHILDREN UNDER 14 YEARS OF AGE BASED ON  
LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

(Case Study of Decision Number: 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)

(Hazimah Suherwan, 2110111116, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 92 pages, 2025)

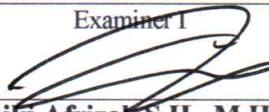
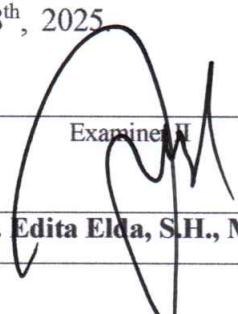
**ABSTRACT**

In this research, the author is interested in examining the legal process in the case with Case Number: 56/Pid.Sus Anak/2023/PN Pdg. which has been decided in the Padang District Court and has permanent legal force. In this case, a childaged 13 years and 4 months committed the crime of extortion as punishable in Article 368 paragraph (2) to 2 of the Criminal Code Jo. SPPA LAW. In the process of law enforcement, the child perpetrator fled out of town with the help of his family, in order to avoid the process of examination, prosecution, and trial. This resulted in the trial being delayed twice. This incident occurred because detention could not be carried out on child perpetrators who were under 14 years of age, as stipulated in Article 32 paragraph (2) of the SPPA Law. The problem in this study are: 1. How is the implementation of detention of children under 14 years of age based on the SPPA Law in Case Number: 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg? 2. What are the obstacles and efforts made by the Padang District Attorney's Office (Kejari) in handling cases on the detention of children under the age of 14? In this writing the author uses empirical juridical research methods, with the data used is primary data obtained from interviews with the Public Prosecutor of the Padang District Attorney's Office and the Judge of the Padang District Court. The secondary data used is literature study. From this research it is concluded that 1. The implementation of the legal process for children under 14 years of age is not in accordance with the detention arrangements in the SPPA Law. Due to the uncooperative attitude of the perpetrator's child, it has hampered the law enforcement process, so that action is needed to secure the perpetrator's child because detention cannot be carried out against him. 2. The obstacles and efforts in handling cases faced by the Kejari are: a. Legal vacuum; b. There is no budget to conduct searches; c. The parents of the perpetrator's child obstruct the law enforcement process; d. Lack of legal awareness; e. Lack of legal awareness; f. Absence of guilt and responsibility from the child perpetrator. Efforts in overcoming these obstacles are: a. Placing the perpetrator's child in the North Padang Police Mushola; b. Searching for the perpetrator's child using personal funds; c. Giving a warning to the perpetrator's parents; d. Providing empowerment measures to child perpetrators; e. Speedy Justice; f. Placing the perpetrator child back in LPKS.

**Keywords:** Detention, Children, Juvenile Justice System

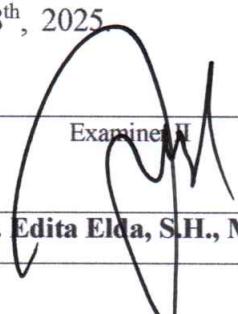
This minor thesis has defended in front of the examiner team at June 18<sup>th</sup>, 2025

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Riki Afrizal, S.H., M.H.	Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: